

**BAGI HASIL PENGELOLAAN PARKIR TURNAMEN SEPAK BOLA
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Pejambon Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

HABIB MUSTHOFA

NPM 1621030509

Program studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

**BAGI HASIL PENGELOLAAN PARKIR TURNAMEN SEPAK BOLA
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

(Studi di Desa Pejambon Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

HABIB MUSTHOFA

NPM 1621030509

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. Susiadi AS., M.Sos.I.

Pembimbing II : Fathul Mu'in, M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/ 2021 M**

Abstrak

Berangkat dari sebuah kegiatan bagi hasil pengelolaan Parkir Turnamen sepak bola dalam tinjauan hukum islam. Bagi hasil antara pengelola dengan pemilik lahan yaitu dengan cara pengelola memberi uang Rp.50.000.00 dari satu lahan yang disewa oleh pengelola yang mana pembagian hasil dari lahan yang dimanfaatkan guna dijadikan tempat parkir yaitu seminggu sekali atau perminggu yang dimana ada 5 pemilik lahan dan cara pembagian hasilnya disamaratakan antara pemilik lahan satu dengan yang lainnya, sehingga total uang yang diberikan oleh pengelola kepada 5 pemilik lahan yaitu sebesar Rp.250.000.00 perminggunya. Sedangkan bagi hasil antara pengelola dengan pekerja parkir yaitu dengan cara pekerja parkir terlebih dahulu mengumpulkan uang hasil parkirnya kepengelola, setelah itu uang yang terkumpul dari lima (5) lahan parkir tersebut dijumlahkan dan dibagi 50% untuk pekerja 50% untuk pengelola. 50% untuk pekerja tersebut harus dibagi oleh 10 pekerja parkir. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini 1) Bagaimanakah bagi hasil pengelolaan parkir turnamen sepak bola di Desa Pejambon Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, 2) Bagaimanakah bagi hasil pengelolaan parkir turnamen sepak bola dalam tinjauan hukum islam di Desa Pejambon Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. dalam penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk mengetahui bagaimana bagi hasil pengelolaan parkir turnamen sepak bola di Desa Pejambon Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran? 2) Untuk mengetahui bagaimana bagi hasil pengelolaan parkir turnamen sepak bola dalam tinjauan hukum islam?. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Sedangkan dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan 1) Observasi, 2) Wawancara, 3) Dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan 1) Data primer 2) Data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian tersebut bagi hasil parkir open turnamen sepak bola di Desa Pejambon Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. 1) Bagi hasil dilakukan oleh pengelola dengan pemilik lahan yaitu dengan cara pembagian hasilnya disamaratakan antara pemilik lahan satu dengan yang lainnya, sedangkan lahan yang dimiliki mempunyai ukuran yang berbeda-beda sehingga secara tidak langsung membuat pemilik lahan yang besar merasa dirugikan. sedangkan bagi hasil yang dilakukan pengelola dengan pekerja parkir yaitu bagi hasil dengan ketentuan 50% dari hasil parkir perharinya dan dibagi merata ke 10 pekerja sedangkan lahan parkir yang dijaga oleh setiap pekerja berbeda-beda ada yang ramai dan ada yang sepi, sehingga secara tidak langsung hal ini cukup menambah tanggung jawab yang dibebankan kepada pekerja parkir yang lahan parkirnya ramai sedangkan upah yang diperoleh harus disamaratakan dengan pekerja parkir yang lahan parkirnya sepi. 2) Bagi hasil yang dilakukan antara pihak pengelola dengan pemilik lahan serta pengelola dengan pekerja parkir tidak sesuai dengan hukum Islam (hukum ekonomi syariah) karena tidak memenuhi syarat *mudharabah*, tidak adanya kejelasan pembagian keuntungan baik pengelola dengan pemilik lahan maupun pengelola dengan pekerja parkir.



**KEMENTRIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Bagi Hasil Pengelolaan Parkir Turnamen
Sepak Bola Dalam Tinjauan Hukum Islam
(Studi di Desa Pejambon Kecamatan Negeri
Katon Kabupaten Pesawaran)**

**Nama : Habib Musthofa
NPM : 1621030509
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Muamalah**

MENYETUJUI

**Telah dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

**Dr. Susiadi AS., M.Sos.I.
NIP.195808171993031002**

Pembimbing II

**Fathul Mu'in, M.H.I.
NIP.**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“BAGI HASIL PENGELOLAAN PARKIR TURNAMEN SEPAK BOLA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM “Studi di Desa Pejambon Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran”** disusun oleh **Habib Musthofa NPM. 1621030509** Jurusan **Muamalah**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **1 Maret 2021**

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)

Sekretaris : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag. (.....)

Penguji Utama : Drs. H. Hariyanto H., M.H. (.....)

Penguji I : Dr. Susiadi AS., M. Sos.I (.....)

Penguji II : Fathul Mu'in., M.H.I. (.....)



**Dekan Fakultas Syariah
UIN Raden Intan Lampung**

Dr. H. Kholidin Tahmid, M.H.

NIP. 196210221993031002

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya..” (QS Al Maa-idah ayat 2)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan, Skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orangtuaku Ayah dan Ibu tercinta, ayahku Edi Wartoyo S.Pd.I dan ibuku Wijiasih yang tidak pernah berhenti untuk selalu mendoakan dan memberikan dukungan, motivasi kepada saya, baik dukungan moril maupun materil, dan senantiasa membimbingku dengan tulus dan dengan sangat baik sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan selama menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan studi di UIN Raden Intan Lampung.
2. Kakak saya Tri Suwarni dan adik Farid Hambali yang sudah memberikan dukungan kepada saya.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung;

RIWAYAT HIDUP

Habib Musthofa lahir di Natar, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, pada tanggal 19 Mei 1998. Anak pertama yang terlahir dari pasangan Bapak Edi Wartoyo S.Pd.i dan Ibu Wijiasih.

Riwayat pendidikannya :

1. Sekolah Dasar di SDN 3 Negara Saka pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2010.
2. kemudian melanjutkan pendidikan Madrasah Tsanawiyah di MTS darul Ma'arif selesai pada tahun 2013.
3. Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Negeri Katon selesai pada tahun 2016.

Kemudian melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dan mengambil program studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah) pada Fakultas Syariah.

Bandar Lampung,
Penulis,

Habib Musthofa
NPM. 1621030509

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur *alhamdulillah rabbil'alam* penulis panjarka atas kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah - Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“BAGI HASIL PENGELOLAAN PARKIR TURNAMEN SEPAK BOLA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi di Desa Pejambon Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)**. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang berilmu pengetahuan. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata satu (S1) di Fakultas Syariah Universitas Raden Intan Lampung.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha secara mandiri, banyak sekali menerima motivasi, bantuan pemikiran dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang tak terhingga diberikan kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M. Ag. beserta staf dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus tercinta ini;
2. Dekan fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung Dr.H. Khairuddin Tahmid, M.H. yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan;

3. Khairuddin, M.S.I selaku ketua jurusan muamalah dan Ibu Juhrotul Khulwah, S.H, M.H. selaku sekretaris jurusan muamalah yang penuh kesabaran dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Dr. Susiadi AS., M. Sos.I. selaku pembimbing I dan bapak Fathul Mu'in .M.H.I. selaku pembimbing II, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat;
6. Semua narasumber, yang telah meluangkan waktu dan tenaganya yang sudah berkenan untuk dimintai informasi sehingga peneliti dapat menggali informasi dalam penelitian skripsi ini.
7. wawan,luthfi,fani,aji,rian,hadi,paidi,faiz,syaihul,saiful,fitri,fauzi,putra teman- teman saya yang sudah mendukung dan salalu memotifasi saya dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan jurusan Muamalah angkatan 2016. khususnya muamalah kelas i terima kasih atas kebersamaannya serta yang saling memberikan semangat dan motivasi.

Bandar Lampung,
Penulis,

Habib Musthofa
NPM. 1621030509

DAFTAR ISI

HALAMAN	
ABSTRAK	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Penjelasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian/Batasan Masalah	8
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan Penelitian	8
G. Signifikansi Penelitian	9
H. Metode Penelitian	9

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Konsep Umum Mudharabah	17
1. Mudharabah Dalam Fiqih Muamalah	17
a. Pengertian Mudharabah	18
b. Dasar Hukum Mudharabah	20
c. Prinsip-Prinsip Mudharabah.....	23
d. Rukun dan Syarat Mudharabah.....	24
e. Macam-macam Mudharabah.....	29
f. Hak dan Kewajiban dalam Mudharabah	31
g. Berakhirnya Mudharabah.....	36
2. Konsep Parkir	39

a.	Pengertian Parkir	39
b.	Dasar Hukum	40
c.	Sistem Pengelolaan Parkir	41
d.	Pola-Pola Parkir	44
B.	Tinjauan Pustaka	50
BAB III :	LAPORAN HASIL PENELITIAN	
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
B.	Struktur Organisasi dan Bagan Pertandingan.....	61
C.	Sistem Management Parkir dan Biaya Parkir.....	65
D.	Praktek Bagi hasil.....	67
BAB IV :	ANALISA DATA	
A.	Praktik Bagi Hasil Antara Pengelolaan Dengan pemilik lahan dan Pekerja Parkir di Desa Pejambon Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.....	74
B.	Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pengelola Dengan Pemilik Lahan dan Pekerja Parkir di Desa Pejambon Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.....	77
BAB V :	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	82
B.	Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Kepala Desa	55
2. Biaya Parkir	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam pembuatan proposal ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak ada kejadian salah pemahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun Skripsi ini berjudul “**Bagi Hasil Pengelolaan Parkir Turnamen Sepak Bola Dalam Tinjauan Hukum Islam**”. Selanjutnya penulis tegaskan beberapa istilah penting yang terdapat pada judul tersebut:

1. Bagi Hasil adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan (100%) modal atau lahan, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola dengan upah yang diperoleh dari hasil lahan tersebut.¹
2. Pengelolaan adalah pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.²

¹ Antonio, Muhammad Syafi’I, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktekan*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2001). h. 95.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Pustaka, 2002), edisi ketiga, h, 590.

3. Parkir adalah menghentikan dan menaruh kendaraan untuk beberapa lama di tempat yang telah disediakan.³
4. Turnamen adalah pertandingan yang diikuti oleh beberapa regu⁴
5. Sepak bola adalah permainan beregu di lapangan, menggunakan bola sepak dari dua kelompok yang berlawanan yang masing-masing terdiri atas sebelas pemain, berlangsung selama 2 x 45 menit, kemenangan ditentukan oleh selisih gol yang masuk ke gawang lawan.⁵
6. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya); perbuatan meninjau.⁶

Dengan penegasan judul di atas, maksud dari skripsi ini adalah meninjau terhadap Bagi Hasil Pengelolaan Parkir Turnamen Sepak Bola Dalam Tinjauan Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan mendasar dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Alasan objektif

Kegiatan open turnamen sepak bola di desa pejambon kecamatan negeri katon kabupaten pesawaran terdapat praktik muamalah yaitu bagi hasil *mudharabah* . dan ingin mengetahui scara langsung praktik bagi hasil pengelolaan parkir yaitu :

³. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan....h.1098

⁴ Departmen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011). h, 1508.

⁵ *Ibid*, h. 1278

⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008). h. 1529.

1. Bagaimanakah kesepakatan awal praktik bagi hasil dan apakah praktik bagi hasil sudah sesuai dengan akad *mudharabah*.
 2. apakah praktik bagi hasil tersebut diperbolehkan dalam hukum islam atau tidak.
2. Alasan subjektif

Judul yang penulis buat belum ada yang membahas, khususnya di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yaitu mengenai "Bagi Hasil Pengelolaan Parkir Turnamen Sepak Bola Dalam Tinjauan Hukum Islam". Disamping itu juga ada relevansinya dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari sebagai mahasiswa syari'ah prodi Muamalah.

C. Latar Belakang Masalah

Muamalah merupakan salah satu bagian dari Hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup antar manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Menurut Ad-Dimyati, muamalah adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrowi. Sedangkan menurut Muhamad Yusuf Musa, muamalah adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia⁷.

Allah menjadikan manusia dengan saling membutuhkan satu sama lain, sebagai makhluk sosial manusia tidak terlepas untuk saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010). h. 3.

kepentingan hidup masing-masing, Islam mengajarkan untuk bermuamalah secara benar baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, berserikat, bercocok tanam dan usaha-usaha lainnya⁸. Dalam masyarakat ada beberapa orang yang mampu mengolah lahan kosong dan membuatnya berproduksi, sementara itu ada orang lain yang mempunyai lahan kosong tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengelolanya, Hal ini menimbulkan adanya konsep yang dapat mengadakan sebuah akad kerja sama sehingga tidak ada potensi yang akan tersia-siakan.

Dasar hukum tentang kebolehan untuk kerja sama bagi hasil adalah sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Quran surah An-nisa ayat 29 yang berbunyi:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁹

Bagi hasil adalah suatu kegiatan yang diharamkan, oleh sebab itu Allah SWT menyediakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh semua makhluk-Nya di muka Bumi ini. Salah satunya yang bisa dipakai oleh manusia yaitu dengan jalan pengelolaan lahan kosong yang dimanfaatkan sebagai lahan parkir. Sehingga dalam bisnis Islam pengelolaan lahan kosong

⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1998). h. 278.

⁹ Al-Quran surah An-nisa ayat 29

yang dijadikan area parkir sangat diperhatikan karena melalui pengelolaan lahan tersebut manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam hal mendapatkan makanan pokok.

Open tournament sepak bola membutuhkan lahan kosong di area lapangan untuk dikelola menjadi tempat parkir dan tidak semua pengelola memiliki lahan, dalam hal ini dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu pemilik lahan, pengelola lahan, dan penjaga parkir.

Bagi Hasil Pengelolaan Parkir Turnamen Sepak Bola sudah terjadi sejak tahun 2016 dan merupakan tradisi masyarakat Desa Pejambon Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran hingga saat ini. Hal ini terjadi karena tidak adanya lahan khusus dari desa yang akan dikelola untuk dijadikan tempat parkir sehingga pengelola parkir menyewa lahan masyarakat disekitar lapangan desa Pejambon guna dijadikan tempat parkir.

Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Parkir Turnamen Sepak Bola, pembagian keuntungan antara pemilik lahan dan pengelola lahan dibagi dengan disamaratakan. sedangkan antara pemilik lahan satu dan lainnya memiliki lahan yang berbeda beda, sehingga adanya kesenjangan sosial antara pemilik lahan satu dengan yang lainnya, pihak yang merasa lahannya lebih besar dari lahan lainnya yang digunakan untuk tempat parkir merasa tidak sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan oleh pengelola. Dalam hal ini ada pemilik lahan terkadang meminta pembayaran yang lebih tinggi di luar dari ketentuan yang sudah diberikan oleh pengelola tetapi lahan yang

disediakan tidak sesuai, hal ini membuat pengelola membagi hasil keuntungan dengan cara di samaratakan.

Sewa adalah suatu yang dijanjikan akan dibayar penyewa sebagai kompensasi atau pembayaran manfaat yang dinikmatinya. Sewa atau upah harus sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan syara' serta diketahui jumlahnya dan ditentukan dalam ukuran atau batas waktu tertentu.¹⁰ Sedangkan cara pembagian keuntungan antara pengelola dengan pekerja parkir ialah dengan pembayaran perhari atau setelah pertandingan pada hari itu telah selesai, dengan cara digabungkan hasil parkir antar pekerja parkir satu dengan yang lain, setelah hasil parkir tersebut digabungkan kemudian disetorkan kepada pengelola. Setelah hasil parkir sudah terkumpul kemudian pengelola membagi keuntungan parkir tersebut kepada pekerja parkir dengan cara disamaratakan, sedangkan pengelola tidak mengetahui ramai atau tidaknya tempat parkir satu dengan yang lainnya, dalam hal ini pekerja parkir merasa pembagian hasil dari keuntungan parkir tersebut kurang jelas karena pekerja parkir yang satu lebih ramai orang yang parkir dari pekerja parkir lainnya akan tetapi pembayarannya sama dengan pekerja lainnya.

Masalah tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2012 tentang Restibusi Jasa Usaha Bab V11 Restibusi Tempat Khusus Parkir, bagian kedua tentang cara mengukur tingkat penggunaan jasa, Pasal 18 yaitu tingkat penggunaan jasa tempat khusus parkir diukur berdasarkan jenis tempat, jenis kendaraan dan jangka waktu

¹⁰ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 124

penggunaan tempat khusus parkir, dan struktur dan besarnya tarif pasal 19,¹¹ yaitu :

JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2
Parkir di tempat khusus	
a. Kendaraan bermotor roda 2 dan 3.	Rp. 1000/satu kali parkir
b. Kendaraan beroda 4 (sedan, jeep, station wagon/mini bus dan pick up.	Rp. 2000/satu kali parkir
c. Truck, bus, kendaraan kereta gandeng, tronton, trailer dan alat berat.	Rp. 3000/satu kali parkir

Kerja sama bagi hasil pengelolaan parkir ialah suatu bentuk *mudharabah*. Dimana satu pihak menyediakan lahan kosong dan pihak lain sebagai pengelolanya berdasarkan prinsip bagi hasil.

Makna *mudharabah* bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak pakai atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan (upah sewa), yang tidak diikuti oleh pemindahan hak milik atas barang yang disewa. Substansi akad *mudharabah* terletak pada pengambilan manfaat barang atau jasa yang diimbangi dengan upah dalam waktu tertentu¹².

Berdasarkan latar belakang diatas perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Parkir Turnamen Sepak Bola Dalam Tinjauan Hukum Islam.

¹¹Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 tahun 2012 Tentang Restibusi Jasa Usaha

¹² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016). h. 219.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah berfokus pada sistem bagi hasil pengelolaan parkir turnamen sepak bola, apakah sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah atau belum.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti, adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini yaitu :

1. Bagaimanakah praktik bagi hasil pengelolaan parkir turnamen sepak bola di desa Pejambon Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran?
2. Bagaimanakah pandangan hukum islam terhadap praktik bagi hasil pengelolaan parkir turnamen sepak bola di desa Pejambon Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang di buat diatas maka dapat di ambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik bagi hasil pengelolaan parkir turnamen sepak bola di desa Pejambon Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

2. Untuk mengetahui bagaimana menurut hukum islam terhadap praktik bagi hasil pengelolaan parkir turnamen sepak bola di desa Pejambon Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

G. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat atau signifikansi sebagai berikut:

1. Secara teoristis penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai sistem bagi hasil pengelolaan parkir turnamen sepak bola dengan sistem yang sesuai dengan Fiqh Muamalah yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist dalam pandangan dan penilaian hukum Islam dan diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran keislaman pada umumnya, civitas akademik Fakultas Syariah, prodi Muamalah pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulator bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
2. Secara Praktis penelitian ini bertujuan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan

menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.¹³ Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang sistem bagi hasil pengelolaan parkir turnamen sepak bola dengan objek kajian di Desa Pejambon Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu dalam hal ini realitas hidup yang ada dalam masyarakat menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan. Penelitian dimaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat.¹⁴ Pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini telah berkecamuk dan mengekspresikan dalam bentuk gejala atau proses sosial.

2. Sifat penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini adalah deskriptif analisis, yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau prediksi. Pengertian deskriptif

¹³ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. (Jakarta: Grasindo, 2008), .h. 2-3.

¹⁴ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung : C.V. Pustaka Setia, 2002). h. 54.

menitik beratkan pada observasi dan setting alamiah. Penelitian bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati dan mencatat serta tidak memanipulasi dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.¹⁵

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti¹⁶. Data primer dalam studi lapangan didapatkan dari hasil wawancara kepada responden dan informan terkait penelitian. data primer yang diperoleh dari narasumber yang bersumber dari pengelola lahan dan pemilik lahan yang berkaitan dengan sistem bagi hasil.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari penelitian sendiri. Data skunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku fiqih muamalah dan buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

¹⁵ Mardalis, *Metode Pendekatan Suatu Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, cet-ke 13, 2014). h. 26.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, cet-ke 27, 2018). h. 225.

4. Alat Pengumpul Data

Wawancara merupakan sebuah bentuk komunikasi verbal, yaitu semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan penelitian. Dengan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula oleh pencari informasi dan sumber informasi. Wawancara langsung diadakan dengan orang yang menjadi sumber data dan dilakukan tanpa perantara, baik tentang dirinya maupun tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Adapun wawancara tidak langsung dilakukan terhadap seseorang yang dimintai keterangan tentang orang lain.¹⁷

5. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik yang sama dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian di tarik kesimpulan. Penelitian ini menggunakan populasi 16 narasumber yang diambil sebagai sumber data pada penelitian.

¹⁷ Mardalis, *Metode penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017).
h. 64

b. Sample

Sample di artikan sebagai bagian dari populasi yang di ambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karateristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.¹⁸ Sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling yaitu teknik penentuan sample yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan populasi yang diketahui sebelumnya.¹⁹ Dalam hal ini penentuan sample sebagai responden dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan kedudukannya yang dapat mewakili populasi penelitian. Adapun yang menjadi sample penelitian ini adalah 5 orang sebagai pemilik lahan 10 orang pekerja parkir dan 1 orang pengelola lahan.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data.²⁰ Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standard. Untuk itu dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode, yaitu :

¹⁸ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian Dan Penertiban LP2M Institute Agama Islam Negri Raden Intan Lampung, 2015). h. 81.

¹⁹ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007). h. 119.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, cet-ke 27, 2018). h. 224.

a. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²¹ Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap praktik bagi hasil pengelolaan parkir turnamen sepak bola di Desa Pejambon Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²² Dalam hal ini peneliti mewawancarai beberapa orang pengelola lahan dan pemilik lahan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.²³

²¹ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015). h. 70.

²² Cholid Narbuko, Abu Achmadi....h. 83.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2013). h. 188.

7. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Editing*

Mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuannya yaitu untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada didalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.²⁴

b. *Sistematic*

Sistematic yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh. Yang bertujuan untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.²⁵

8. Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan dianalisis. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematika data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara menyusun pola memilih mana yang penting yang harus

²⁴ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015). h. 153.

²⁵ *Ibid*, h 21

dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri dan orang lain.²⁶

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu bagi hasil pengelolaan parkir turnamen sepak bola dalam tinjauan hukum Islam yang akan dikaji menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Penelitian ini penulis menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan suatu gejala atau kaidah-kaidah lapangan yang umum mengenai fenomena yang diselidiki.²⁷ dari fakta-fakta yang bersifat khusus atau peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam mengolah data hasil penelitian lapangan yaitu berangkat pendapat dari perorangan kemudian dijadikan pendapat pengetahuannya bersifat umum.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991). h. 145.

²⁷ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015). h. 4.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Umum *Mudharabah*

1. *Mudharabah* Dalam Fiqih Muamalah

Kata *mudharabah* mempunyai beberapa definisi, dalam fiqh muamalah ada empat imam besar yang menjelaskan tentang *mudharabah*. Diantaranya menurut imam Hanafi, *mudharabah* adalah suatu perjanjian untuk berkongsi didalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja atau usaha dari pihak lain.¹

Sementara Imam Maliki mendefinisikan *mudharabah* sebagai penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.²

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa *mudharabah*, dimana pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.³

Sedangkan menurut Imam Hambali *mudharabah* merupakan penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan

¹Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: UPP- Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), h. 82.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.⁴

a. Pengertian *Mudharabah*

Menurut bahasa, *qiradh* diambil dari kata *al-qardu* yang berarti *al-qad'u* (potongan), sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Bisa juga diambil dari kata *muqaradhah* yang berarti (kesamaan), sebab itu pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.⁵

Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedang pihak lain sebagai pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan dua pihak yang dituangkan dalam akad (kontrak), jika terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul mal*), selagi kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola (*mudharib*), maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁶

Mudharabah merupakan suatu bentuk kerjasama yang ada sejak jaman Rasulullah SAW sejak zaman jahiliah. Dan Islam menerimanya dalam bentuk investasi dan bagi hasil. Dalam bahasa arab ada tiga istilah yang digunakan untuk bagi hasil yaitu: *Qiradh*, *muqaradhah* dan

⁴ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: UPP- Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), h. 82.

⁵ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 223.

⁶ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syari'ah di Indonesia dalam Prespektif Fikih Ekonomi*, (Jakarta: Fajar Media Press, 2010), h. 184.

mudharabah. Ketiga istilah ini tidak ada perbedaan prinsip ini mungkin disebabkan oleh faktor geografis Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal di Irak menggunakan istilah *mudharabah*, sebaliknya Imam Malik dan Imam syafi'i menggunakan istilah *muqaradhah* atau *qiradh*.⁷

Mudharabah menurut hasbi ash shiddieqy yaitu syarikat akad, bermufakat dua orang pada dasarnya dengan ketentuan : modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain, dan ketentuan-ketentuan dibagi antara mereka. Menurut kasmir *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak, pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola, keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, apabila rugi maka ditanggung pemilik modal selama kerugian diakibatkan kelalaian pengelola.⁸

Menurut Ascarya, *Mudharabah* meruoakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), menyediakan modal seutuhnya kepada pengelola, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya dalam akad.⁹

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan dalam akad *mudharabah*, dimana pemilik modal

14. ⁷ Hasanudin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Press, 2008), h.

⁸ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalat*, (Jakarta: Bulan Bintang), h. 90.

60. ⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.

memberikan modal ke pihak pengelola, keuntungan tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan, namun kerugian ditanggung oleh si pemilik modal.

b. Dasar Hukum *Mudharabah*

Islam memandang *mudharabah* sebagai akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Islam juga mensyari'atkan dan memperbolehkan kepada semua umatnya untuk memberikan keringanan kepada umat lain. Seseorang memiliki harta tetapi ia tidak memiliki kemampuan untuk mengelola harta tersebut lebih produktif, hal ini menjadi salah satu alasan Islam mensyari'atkan untuk bermuamalah, agar kedua pihak mengambil manfaatnya.

Berikut ini merupakan dasar-dasar hukum *mudharabah* sebagai berikut :

1) Al-Qur'an

berikut adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan *mudharabah* :

QS Al- Baqarah ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ

Artinya :“ tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”¹⁰

¹⁰ QS Al- Baqarah ayat 198.

QS Al- jumu'ah ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : “ apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu
di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah
Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”¹¹

2) Hadist

Hadist yang berkaitan dengan *mudharabah* adalah hadist yang
diriwayatkan oleh ibn majah dari shuhaib bahwa rasulullah SAW
bersabda :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،
وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya : “Rasulullah SAW bersabda “ada tiga hal yang mengandung
berkah: jual beli tidak secara tunai, peminjaman, dan
mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan
rumah tangga, bukan untuk dijual.”(HR. Ibnu Majah dan
shuhaib).¹²

3) Ijma

Diantara *ijma* dalam *mudharabah*, adanya riwayat yang
menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak
yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh

¹¹ QS Al- jumu'ah ayat 10.

¹² Ibnu Hajar AL-Asqalani, *Bulighul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Jakarta : PT Elex
Media Kumputindo, 2012).

sahabat lainnya.¹³ Kata *Ijma* secara bahasa berarti, kebulatan tekad terhadap suatu persoalan atau kesepakatan tentang suatu masalah. Menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, adalah kesepakatan para *mujtahid* dari kalangan umat Islam tentang hukum *syara* pada satu masa setelah Rasulullah wafat. Sedangkan menurut Abu Zahra, para ulama sepakat bahwa *ijma* adalah sah dijadikan sebagai dalil hukum.¹⁴

4) Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh orang untuk mengola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Disatu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Disisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal, dengan demikian, adanya *mudharabah* ditunjukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.¹⁵

Qiyas menurut bahasa berarti mengukur suatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya. Sedangkan menurut istilah *qiyas* adalah satu kegiatan *ijtihad* yang tidak ditegakan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Adapun *qiyas* dilakukan seseorang mujtahid dengan meneliti alasan logis (*illat*) dari rumusan hukum itu

¹³Rachmad Syafe'i, *fiqh muamalah*...., h. 226.

¹⁴Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), h. 125.

¹⁵Rachmad Syafe'i, *fiqh muamalah*...., h. 226.

dan setelah itu diteliti pula keberadaan *illat* yang sama pada masalah lain yang tidak termasuk dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.¹⁶

c. Prinsip-Prinsip Mudharabah

Terdapat beberapa prinsip dalam *mudharabah* yaitu :

1. Modal

Modal atau barang yang diserahkan oleh pemilik modal kepada pengelola untuk melakukan kegiatan usaha.

2. Manajemen

Ketika pengelola (*mudharib*) telah siap dan menyediakan tenaga untuk kerjasama maka saat itulah ia mulai mengelola modal *shahib al-mal* (pemilik modal). tugas pengelola dalam menjalankan kontrak *mudharabah* yaitu mengelola dan mengatur semua kegiatan usaha yang telah ditetapkan, sehingga usaha tersebut bisa berjalan dengan baik.

3. Masa berlakunya kontrak

Kontrak tidak memuat aturan khusus mengenai batas berlakunya suatu kontrak, Jika adanya batasan dalam kontrak maka masa berlakunya kontrak akan membuat kontrak batal.

4. Jaminan

Investor atau yang biasa disebut dengan pemilik modal tidak dapat meminta jaminan dari pihak pengelola untuk memastikan

¹⁶Satria Efendi, *Ushul Fiqh....*, h. 130.

kembalinya modal yang telah diberikan kepada pengelola beserta keuntungannya.

5. Prinsip bagi hasil

Kontrak *mudharabah* terdapat pembagian hasil dari usaha atau yang disebut dengan pembagian keuntungan, dalam pembagian keuntungan dilakukan dengan menetapkan tingkat keuntungan (profit) bagi tiap-tiap pihak. Pembagian keuntungan dilakukan melalui tingkat perbandingan rasio, bukan ditetapkan dalam jumlah yang pasti.¹⁷

d. Rukun dan Syarat Mudharabah

Akad *mudharabah* yang sah harus memenuhi rukun dan syaratnya, penggunaan modal pada dasarnya untuk perdagangan umum pada dasarnya untuk perdagangan umum pada praktiknya tidak selalu digunakan untuk bidang perdagangan, tetapi ada juga yang digunakan untuk usaha dalam bidang jasa.¹⁸ menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun *qirad* ada enam, yaitu :

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barang nya.
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
3. *Aqad mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
4. *Mal*, yaitu harta pokok atau modal.
5. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba.

¹⁷Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2012), h. 105.

¹⁸Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 155.

6. *Nisbah*, keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Menurut sayyid sabiq, rukun *mudharabah* adalah ijab dan kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.¹⁹

Syarat-syarat *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* yaitu:

1) Modal ialah sejumlah uang/aset yang diberikan oleh penyediaan dana kepada mudarib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
- b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
- c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

2) Bagi orang yang melakukan akad diisyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada dibawah pengampunan.

3) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan ini harus dipenuhi:

- a. Harus diperuntukan oleh kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.139.

- b. Bagian keuntungan bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentase (nisbah) dari keuntungan sesuai dengan kesepakatan perubahan nisbah juga harus sesuai dengan kesepakatan.
 - c. Penyedia dan menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.²⁰
- 4) Pernyataan *ijabi* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk meunjukkan dkehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Penawaran dan penerimaan harus secara langsung (*eksplisit*), menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespodensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modrn.
 - d. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu sementara diwaktu lain tidak terkena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Bila di dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka

²⁰Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 194.

mudharabah tersebut menjadi rusak (*fasid*) adapun menurut Al-Syafi'i dan Malik. Adapula menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal, *mudharabah* tersebut sah.²¹

Abdurrahman al-Jaziri mengemukakan pendapat di kalangan ulama yaitu:

a. ulama Hanafiyah mengemukakan untuk tercapainya akad *mudharabah* yang sah harus terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

1. Modal berbentuk mata uang, emas atau perak yang dicetak secara resmi. Bila berbentuk bongkahan emas dan perak atau barang, *mudharabah* tidak sah.
2. Jumlah modal diketahui ketika akad sehingga modal yang diperdagangkan dapat dipisahkan dari keuntungan yang akan dibagi.
3. Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola maka tidak sah melakukan *mudharabah* dengan piutang pemodal yang ada pada pengelola.
4. Keuntungan antara pekerja dan pemodal dibagi menurut ukuran yang jelas, seperti seperdua, sepertiga, dan seperempat.
5. Bagian masing-masing diambil dari keuntungan bukan dari modal.

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*..., h. 140.

b. Ulama Malikiyah berpendapat, syarat sah *mudharabah* adalah :

1. Modal diserahkan kepada pekerja dengan tunai apabila diserahkan secara cicilan maka akad batal.
2. Modal diketahui ukurannya ketika akad dan bukan barang jaminan.
3. Modal merupakan sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh suatu masyarakat baik secara *mudharabah* maupun tidak.
4. Jelas ukuran pembagian laba, seperdua, sepertiga, dan sejenisnya.
5. Salah seorang dari keduanya tidak mengkhususkan suatu hal.
6. Yang bekerja itu khusus pekerja maka tidak sah di syaratkan berserikat dengan pemodal atau sekain pemodal bersamanya.
7. Pekerja tidak boleh dibatasi dalam pekerjaannya, seperti dikatakan “tidak boleh berdagang kecuali dalam musim dingin saja”. Lalu tidak dibatasi sampai batas waktu tertentu.²²

c. Syafiiyah berpendapat, adapun syarat sah *mudharabah* semuanya berkaitan dengan rukun *mudharabah*, yakni :

1. Pekerja dan pemodal disyaratkan cakap menurut hukum.

²² *Ibid*

2. Syarat yang berhubungan dengan pekerjaan, yaitu bahwa pekerja bebas dalam pekerjaannya dan pekerjaan itu tidak dalam waktu tertentu.
3. Keuntungan disyaratkan khusus untuk dua orang yang berakad, pembagian keuntungan jelas.
4. Syarat sah *shighat*, yaitu ada ijab dan kabul yang jelas dari pemodal dan pekerja.

d. Menurut Hanabilah, syarat- syarat *mudharabah* adalah :

1. Modal harus diketahui secara jelas ukurannya, nyata atau berada ditanggungan pemodal, berupa mata uang emas atau perak yang berlaku di daerah tersebut.
2. Bagian masing-masing dari keuntungan harus jelas.²³

e. **Macam-Macam Mudharabah**

Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan pengelola maka dari itu para ulama *fiqh* membagi akad *Mudharabah* dibagi menjadi 2 (dua), macam yaitu *mudharabah muthlaqoh*, *mudharabah muqayyadah*.

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqoh* yaitu bentuk kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola yang cangkupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis

²³Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 208

usaha, waktu, daerah bisnis dan jenis pelayanannya. Dalam pembahasan *fiqh* ulama Salafus Saleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al maa syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahib al-mal* (pemilik modal) yang membri kekuasaan penuh kepada pengelola. Namun kebebasan ini bukan kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh islam seperti untuk keperluan spekulasi, perdagangan minuman keras perternakan babi, ataupun berkaitan dengan riba. Namun apabila ternyata pengelola dan melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan. Apabila terjadi kerugian atas usaha yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana²⁴

2. *Mudharabah Muqayyadah*

kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batas jenis usaha, waktu, atau tempat usaha adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki dunia usaha. Misalnya tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjaminan atau mengahruskan pengelola dana untuk

²⁴Enang hidayat, *transaksi ekonomi syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 163.

melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. *Mudharabah* jenis ini disebut juga investasi terikat. Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pemilik dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan.²⁵

f. Hak dan Kewajiban *Mudharabah*

Manusia adalah makhluk sosial. Ia hidup bermasyarakat dan bertolong-tolongan dalam menghadapi berbagai macam tantangan hidup. Adakalanya sesuatu yang dibutuhkan seseorang ada pada orang lain. Kadang-kadang seseorang mampu pada satu bidang. Namun ia tidak ahli pada bidang yang lain. Misalnya seseorang yang ahli perabot ia tidak mampu untuk memasarkan barang dagangannya. Untuk itu ia membutuhkan orang yang ahli di bidang pemasaran. Disinilah timbul interaksi sosial antara sesama manusia. Dari proses interaksi sosial ini munculah hak dan kewajiban. Jadi hak muncul dari hubungan interaktif manusia dengan sesama manusia.

Menurut syariat segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia bersumber dari Allah SWT, termasuk masalah hak. Para ulama sepakat sumber dari hak adalah syarak dan karena syarak pula manusia mempunyai hak, seperti perintah untuk ibadah, perintah untuk menafkahi

²⁵Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 70

keluarga dan lain sebagainya. Disamping itu hak juga muncul karena ada sebab yang melatarbelakanginya seperti munculnya hak timbal balik antara suami istri disebabkan karena perkawinan, yakni suami berkewajiban memberi nafkah, istri juga punya hak untuk dinafkahi. Aturan yang berkenaan dengan hak ini adalah syariat islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang padat dengan segala aturan yang mengatur kehidupan manusia baik didunia maupun diakhirat dan didalam kehidupan bermasyarakat maupun untuk kepentingan individu manusia itu sendiri.²⁶

a. Pengertian Hak dan Kewajiban

Hak menurut bahasa adalah *ats-tsubut wa al-wujud* artinya tetap dan wajib. Sementara itu pengertian hak secara istilah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih, yakni hukum yang telah tetap menurut syariat. Dalam definisi lain hak adalah kewenangan menguasai sesuatu yang wajib atas seseorang terhadap orang lain.

Hak adalah kewenangan atas sesuatu atau sesuatu yang wajib atas seseorang untuk orang lain. Definisi hak yang dikemukakan mustafa Az-Zaraqah diatas dipandang sebagai definisi yang lengkap sesuai dengan konsep fiqh muamalah yang pembahasannya mencakup hak dan kebendaan maka yang dimaksud dengan hak dalam pembahasan ini adalah kekuasaan seseorang untuk menguasai

²⁶Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*..., h. 13-14

sesuatu berupa benda atau dengan istilah lain kaidah yang mengatur tentang orang dan benda yang harus ditaati orang lain.²⁷

Secara etimologi kewajiban dari bahasa arab, *iltizam* yang bermakna keharusan atau kewajiban. Kewajiban berasal dari kata wajib, berarti sesuatu yang harus dilakukan. Wajib ini merupakan salah satu kaidah hukum *taklif*. Substansi hukum *taklif* keharusan yang terbebankan pada pihak lain dari sisi penerima dinamakan hak, sedangkan dari sisi pelaku disebut kewajiban (*iltijam*). Pihak yang terbebani oleh hak orang lain dinamakan *multazim*, sedang pemilik hak dinamakan *multazam lahu* atau *shahibul haq*. Antara hak dan *iltizam* terdapat keterkaitan dalam suatu hubungan timbal balik, sebagaimana hubungan antara perbuatan menerima dan memberi.

Secara istilah, kewajiban adalah akibat (ikatan) hukum yang mengharuskan pihak lain berbuat untuk melakukan sesuatu, atau melakukan suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad *mu'awadhah*, masing-masing mempunyai hak penyeimbang atas kewajiban yang dibebankan kepadanya, atau masing-masing mempunyai kewajiban sebagai penyeimbang atas hak yang diterimanya.²⁸

²⁷Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Cetakan 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 75

²⁸Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2017), h. 53

b. Hak dan Kewajiban Pemilik Modal

1. Hak *shahibul maal* (Pemilik Modal)

- a. Kewajiban utama dari pemilik modal yaitu menyerahkan modal kepada pengelola. Bila hal ini tidak dilakukan maka perjanjian *mudharabah* tidak sah.
- b. Pemilik modal berkewajiban untuk menyediakan dana yang akan dipercayakan kepada pengelola untuk membiayai suatu kegiatan usaha.
- c. Pemilik modal tidak diperkenankan mengelola kegiatan usaha yang telah dibiayai olehnya. Pengelolaan kegiatan usaha sepenuhnya dilakukan oleh pengelola dana. Pemilik modal berhak untuk melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa pengelola mentaati syarat dan ketentuan perjanjian *mudharabah*. Bagaimanapun juga pemilik modal sebagai pihak yang menyediakan dana dan harus memikul seluruh resiko finansial yang terjadi dan karena tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan usaha yang bersangkutan. Maka hak itu dapat mengurangi kemungkinan pengelola menyimpangi ketentuan dalam perjanjian *mudharabah*. Melakukan kelalaian dalam mengelola usaha yang bersangkutan, bahkan kemungkinan melakukan kecurangan yang dapat membahayakan investasi pemilik modal dalam usaha tersebut.

d. Pemilik modal berhak untuk memperoleh kembali investasinya dari hasil likuidasi usaha *mudharabah* tersebut apabila usaha itu telah diselesaikan oleh pengelola dan jumlah hasil likuidasi usaha tersebut cukup untuk pengembalian dana investasi dari usaha tersebut.²⁹

c. Hak dan Kewajiban Pengelola (*mudharib*)

a. Pengelola berkewajiban menyediakan keahlian, pikiran, waktu, upaya untuk mengelola usaha tersebut serta berusaha untuk memperoleh keuntungan seoptimal mungkin.

b. Pengelola berkewajiban untuk bertindak dengan hati-hati atau bijaksana dan beritikad baik dan bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang terjadi karena kelalaiannya. Pengelola diharapkan untuk menggunakan dan mengelola modal yang ditamanmkan sedemikian rupa sehingga memperoleh keuntungan seoptimal mungkin. Sehingga *mudharabah* yang dimaksud tidak melanggar nilai-nilai Islam.

c. Pengelola berkewajiban mengembalikan pokok dari dana investasi kepada pemilik modal ditambah sebagian dari keuntungan dan pembagiannya telah ditentukan sebelumnya. Ketentuan dan syarat perjanjian *mudharabah* selama mengurus kegiatan usaha *mudharabah*.

²⁹ *Ibid*

d. Pengelola melakukan tugasnya tanpa boleh ada campur tangan dari pemilik modal yang menjalankan dan mengelola usaha *mudharabah* tersebut.³⁰

g. Berakhirnya *Mudharabah*

Kontrak *mudharabah* dapat diberhentikan kapan saja oleh salah satu pihak dengan syarat memberi tahu kepada pihak lain terlebih dahulu jika semua aset dalam bentuk cair/tunai pada saat usaha dihentikan dan usaha tersebut telah menghasilkan keuntungan, maka keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal. Jika aset belum dalam bentuk cair/tunai, pengelola harus diberi waktu untuk melikuidasi (pembubaran perusahaan dengan cara melakukan penjualan harta perusahaan), agar keuntungan atau kerugian dapat diketahui dan dihitung

Terdapat perbedaan pendapat antara para ahli fiqh apakah kontrak *mudharabah* boleh dilakukan untuk periode-periode waktu tertentu dan kemudian kontrak berakhir secara otomatis. Hanafiah dan Hambali berpendapat boleh dilakukan seperti stau tahun, enam bulan, dan seterusnya. Sebaliknya, Syafi'i dan maliki berpendapat tidak boleh, namun demikian perbedaannya hanya pada batas waktu maksimum. Sementara itu tidak terdapat opini mengenai batas waktu minimum dalam Fiqh Islam. tetapi dari ketentuan umum batas waktu tidak boleh

³⁰ Ismail Nawawi....,h.57

ditentukan, dan setiap pihak boleh menghentikan kontrak kapan saja yang mereka inginkan.

Kekuasaan tak terbatas dari masing-masing pihak untuk menghentikan kontrak kapan saja dapat menimbulkan masalah di zaman sekarang karena sebagian besar perusahaan membutuhkan waktu untuk menghasilkan keuntungan, selain juga memerlukan usaha yang rumit dan konstan. Akhirnya akan timbul bencana jika pemilik modal menghentikan kontrak pada masa awal perusahaan berdiri, khususnya bagi pengelola yang tidak menerima hasil apa-apa meskipun telah mencurahkan tenaga serta pikiran. Oleh karena itu tidak melanggar Syariah jika para pihak setuju ketika memulai kontrak *mudharabah*, semua pihak tidak boleh menghentikan kontrak selama jangka waktu tertentu, kecuali pada keadaan tertentu.³¹

Mudharabah dianggap berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*. Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas melakukan berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian maka kerugian tersebut

³¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*..., h. 64.

menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan kecuali atas kelalaiannya.

2. Akad *mudharabah* batal ketika *shahibu maal* atau *mudharib* murtad. Kemudian meninggal dunia atau dihukum mati karena murtadnya, atau ia pindah ke luar negeri.
3. Dalam hal *mudharabah* tersebut dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
4. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
5. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha bila pengelola melakukan kesia-siaan, melakukan sesuatu yang tidak termasuk dalam ketentuan *mudharabah*. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah yang menyebabkan kerugian tersebut.
6. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi batal. Menurut jumhur ulama *mudharabah* menjadi batal hal ini disebabkan karena dalam akad *mudharabah* ada unsur wakalah, bila orang yang mewakilkan atau menerima wakil meninggal dunia maka akad wakalah menjadi batal. Sementara itu menurut Malikiyah, akad

mudharabah tidak batal dengan meninggalnya salah seorang yang berakad. Apabila yang meninggal itu *mudharib* maka ahli waris dapat menggantikan dan melanjutkan usaha tersebut jika ia dapat dipercaya.

7. Usaha yang dilakukan mengalami kerugian yang mengakibatkan modal habis atau berkurang ditangan *mudharib*. akad *mudharabah* menjadi batal karena modal berkurang atau habis. Begitupun kalau modal diserahkan kepada orang lain *mudharabah* mennjadi batal.³²

2. Konsep Parkir

a) Pengertian Parkir

Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat. Setiap pengendara kendaraan bermotor memiliki kecenderungan untuk mencari tempat untuk memarkirkan kendaraannya sedekat mungkin dengan tempat kegiatan atau aktifitas orang tersebut. Sehingga tempat-tempat yang dijadikan suatu kegiatan seperti tempat kawasan, tempat pariwisata dan tempat-tempat yang menjadi pusat keramaian sangat diperlukan lahan kosong yang digunakan untuk dijadikan area parkir. Menurut Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.³³

Awal mula pengelolaan parkir dipinggir jalan dilakukan oleh pemerintah daerah melalui perusahaan daerah. Kemudian mulai

³²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 201.

³³Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, Tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan Raya.

berkembang dengan adanya gedung parkir yang juga dikelola oleh pemerintah daerah. namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan, parkir di tepi jalan umum yaitu menempati pelataran parkir tertentu diluar badan jalan, baik itu bangunan khusus parkir maupun ditempat halaman terbuka.³⁴

kegiatan ini ada kaitannya dengan perparkiran, maka pada saat pemilik kendaraan memarkirkan kendaraanya di area parkir baik itu *on street parking* atau *off street parking*, maka hal tersebut sudah terjadi hubungan hukum antara pemilik kendaraan dengan pengelola parkir.

Parkir *on street* adalah parkir pada bahu jalan, sedangkan parkir *off street* yaitu parkir diluar bahu jalan, yang dimaksud dengan parkir diluar bahu jalan adalah parkir yang bertempat pada tempat-tempat tertentu seperti pusat perbelanjaan, tempat perkantoran maupun tempat keramaian yang menyediakan fasilitas tempat parkir untuk umum.³⁵

b) Dasar Hukum

1. undang-undang nomor 22 tahun 2009, Tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan Raya³⁶.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2012, Tentang Restibusi Jasa Usaha.³⁷

³⁴ Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Restibusi Jasa Umum.

³⁵ Warpani Suwardjoko, *Rekayasa Lalu Lintas*, (Jakarta: Bharata 1998), h. 35.

³⁶ Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, Tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan Raya.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 15, restibusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir disediakan dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.³⁸
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2012. Pasal 18 menyatakan tingkat penggunaan jasa tempat khusus parkir diukur berdasarkan jenis tempat, jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.³⁹
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2012, Pasal 19 yaitu Struktur dan Besarnya Tarif.⁴⁰

c) Sistem Pengelolaan Parkir

1. Konsep Pengelolaan

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai di dalam ilmu manajemen yang secara etimologis berasal dari kata “kelola” yang berarti mengarah pada proses menangani sesuatu atau mengurus sesuatu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan secara istilah pengelolaan adalah suatu kegiatan yang mengatur proses jalannya suatu kegiatan atau bisa disebut dengan manajemen untuk

³⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2012, Tentang Restibusi Jasa Usaha.

³⁸ Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2012, Tentang Restibusi Jasa Usaha.

³⁹ Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2012, Tentang Restibusi Jasa Usaha.

⁴⁰ Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2012, Tentang Restibusi Jasa Usaha.

menangani kegiatan agar mencapai tujuan yang diinginkan supaya berjalan lancar. Di dalam pengelolaan mempunyai kaitan dengan manajemen karena di dalam pengelolaan itu sendiri terdapat manajemen dalam suatu kegiatan seperti pengarahan, pengawasan, pengorganisasian serta adanya pencapaian tujuan dengan baik.

Tujuan utama dari pengelolaan parkir ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dalam pemberian pelayanan perparkiran kepada masyarakat serta untuk meningkatkan pendapatan kabupaten pesawaran dari sektor restibusi parkir.

2. Parkir

Parkir adalah suatu keadaan yang dimana ada kendaraan yang berhenti yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya⁴¹. Dengan ini sangat diperlukan pengelolaan parkir yang baik sehingga dapat mewujudkan ketertiban dalam berparkir baik itu ditepi jalan maupun tempat-tempat tertentu.

Dalam hal ini perparkiran mempunyai istilah-istilah penting yaitu:

- a. Durasi parkir, adalah lama waktu dimana kendaraan masih berada dalam posisi parkir.
- b. Fasilitas parkir, yaitu lokasi yang ditentukan yang digunakann sebagai area parkir atau sebagai pemberhentian kendaraan yang bersifat sementara.

⁴¹W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cetakan ke-4*, (Jakarta: Balai Pustaka), h. 1201.

- c. Celukan parkir, adalah jalur tambahan dengan panjang yang terbatas, terutama di desain yang digunakan untuk parkir kendaraan.
- d. Fasilitas parkir luar badan jalan, fasilitas parkir yang dibuat khusus yang berupa gedung parkir .
- e. Fasilitas parkir pada badan jalan, yaitu digunakan untuk parkir kendaraan yang parkir menggunakan sebagian badan jalan.
- f. Fasilitas parkir untuk umum, fasilitas yang berada diluar badan jalan dan area yang digunakan untuk parkir biasanya gedung parkir atau taman yang digunakan sebagai kegiatan usaha sendiri dengan menyediakan area parkir untuk umum.
- g. Jalur sirkulasi tempat yang digunakan untuk pergerakan kendaraan yang masuk dan keluar dari fasilitas parkir.
- h. Restibusi parkir, yaitu pungutan yang dilakukan oleh petugas parkir kepada pemilik kendaraan yang memarkirkan kendaraannya diruang parkir⁴².

Dari pengertian diatas kita bisa menyimpulkan bahwa sistem pengelolaan parkir adalah suatu kegiatan yang mengatur proses jalannya suatu kegiatan dengan menggunakan tenaga orang lain untuk untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Proses tersebut merupakan kaitan antara fungsi dari manajemen yang terdiri dari pengorganisaian, pengawasan, pergerakan dan perencanaan. Dalam pengelolaan parkir menerapkan

⁴²Warpani Suwardjoko, *Rekayasa Lalu Lintas*, (Jakarta: Bharata 1998), h. 37.

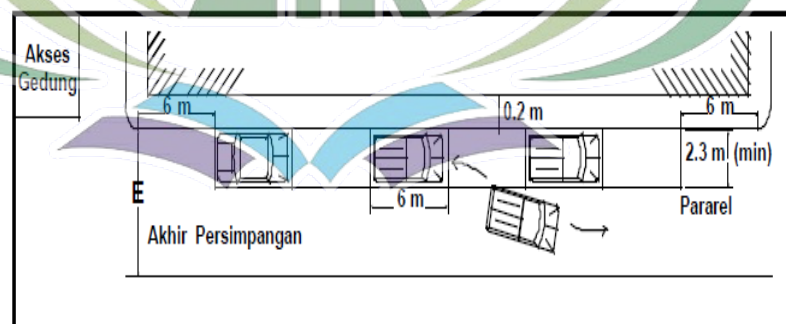
fungsi-fungsi manajemen yang bertujuan agar dalam melaksanakan tugasnya berjalan dengan baik.⁴³

d) Pola-Pola Parkir

Untuk melakukan suatu kebijakan yang berkaitan dengan parkir, terlebih dahulu perlu dipikirkan pola-pola parkir yang akan diterapkan atau dilaksanakan. Pola parkir tersebut akan baik apabila sesuai dengan kondisi yang ada. Menurut Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir (1998) dalam melakukan perparkiran dikenal beberapa pola parkir yaitu:

a. Pola Parkir Pararel

1. Pada Daerah Datar

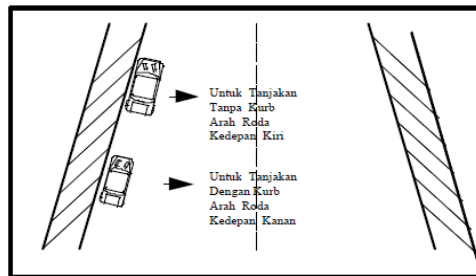


Gambar 1 : Pola parkir pararel pada daerah datar⁴⁴

⁴³Warpani Suwardjoko.... h.38

⁴⁴ Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir (1998).

2. Pola Daerah Tanjakan



Gambar 2 : Pola parkir paralel pada daerah tanjakan

3. Pola Daerah Turunan



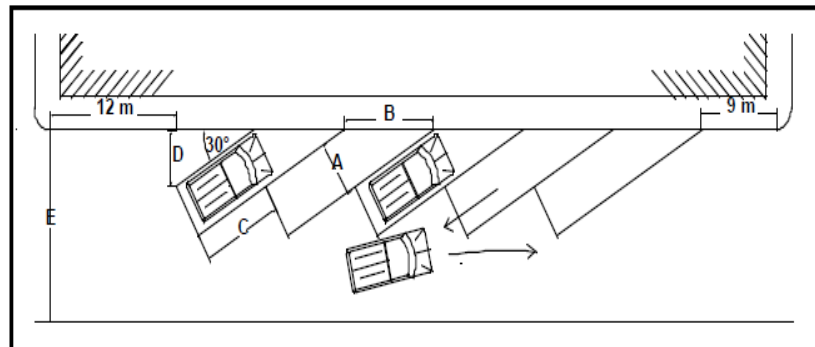
Gambar 3 : Pola parkir paralel pada daerah turunan

b. Pola Parkir Menyudut

1. lebar ruang parkir efektif dan ruang manuver berlaku untuk jalan lokal dan kolektor
2. lebar ruang parkir, ruang parkir efektif dan ruang manuver berbeda berdasarkan besar sudut.⁴⁵

⁴⁵Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir (1998).

a. Sudut = 30^0

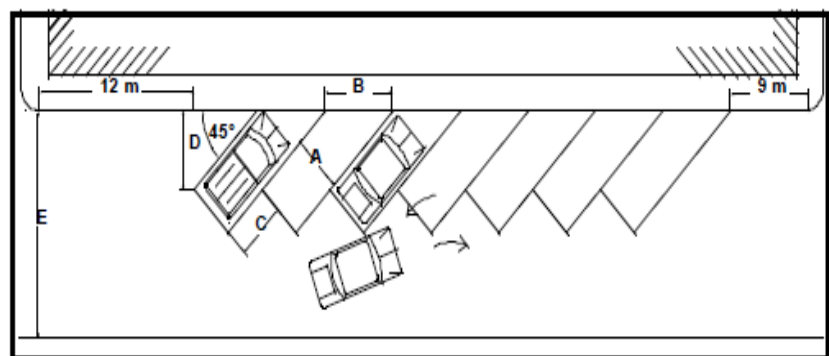


Gambar 1 : Pola parkir menyudut 30^0

Tabel 1 : Lebar Ruang parkir, ruang parkir efektif dan ruang manuver pada pola parkir menyudut 30^0 .⁴⁶

Golongan	A	B	C	D	E
Golongan I	2,3	4,6	3,45	4,70	7,6
Golongan II	2,5	5,0	4,30	4,85	7,75
Golongan III	3,0	6,0	5,35	5,0	7,9

b. Sudut = 45^0



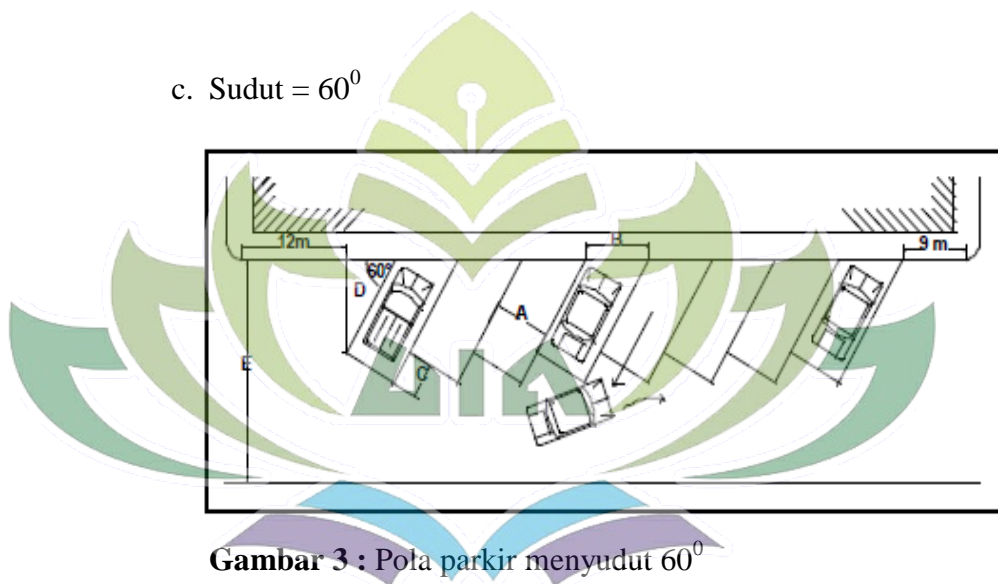
Gambar 2 : Pola parkir menyudut 45^0

⁴⁶Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir (1998).

Tabel 2 : Lebar Ruang parkir, ruang parkir efektif dan ruang manuver pada pola parkir menyudut 45^0 .

Golongan	A	B	C	D	E
Golongan I	2,3	3,5	2,5	5,60	9,30
Golongan II	2,5	3,7	2,6	5,65	9,35
Golongan III	3,0	4,5	3,2	5,75	9,45

c. Sudut = 60^0



Gambar 3 : Pola parkir menyudut 60^0

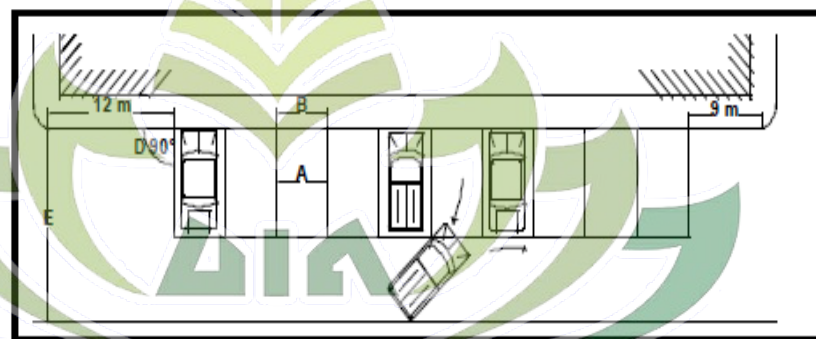
Ketiga pola parkir ini mempunyai daya tampung yang lebih banyak jika dibandingkan dengan pola parkir Pararel, dan kenyamanan serta kemudahan pengemudi untuk masuk atau keluar area parkir lebih luas⁴⁷.

⁴⁷ Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir (1998).

Tabel 3 : Lebar Ruang parkir, ruang parkir efektif dan ruang manuver pada pola parkir menyudut 60^0

Golongan	A	B	C	D	E
Golongan I	2,3	2,9	1,45	5,95	10,55
Golongan II	2,5	3,0	1,50	5,95	10,55
Golongan III	3,0	3,7	1,85	6,00	10,60

d. Sudut = 90^0



Gambar 4 : Pola parkir menyudut 90^0

pola parkir ini mempunyai daya tampung yang lebih banyak jika dibandingkan dengan pola parkir Pararel, dan kenyamanan serta kemudahan pengemudi untuk masuk atau keluar area parkir lebih sedikit dibandingkan dengan pola parkir yang lebih kecil dari 90^0 .⁴⁸

⁴⁸ Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir (1998).

Tabel 4 : Lebar Ruang parkir, ruang parkir efektif dan ruang manuver pada pola parkir menyudut 90⁰.

Golongan	A	B	C	D	E
Golongan I	2,3	2,3	-	5,4	11,2
Golongan II	2,5	2,5	-	5,4	11,2
Golongan III	3,0	3,0	-	6,4	11,2

Keterangan :

A : Lebar ruang parkir (meter)

B : Lebar kaki ruang parkir (meter)

C : Selisih panjang ruang parkir (meter)

D : Ruang parkir efektif (meter)

E : Ruang parkir efektif ditambah ruang manuver (meter)

M : Ruang manuver (meter)⁴⁹

B. Tinjauan Pustaka

Suatu penelitian diperlukan juga dukungan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, untuk mrnghindari terjadinya tumpang tindih dan tidak terjadi penelitian ulang dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis mempertegas perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, antara lain:

⁴⁹Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir (1998).

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mia Mandasari (2019) Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Mudharabah menjelaskan bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan diinspirasi corner dengan ketetapan 5% dari omset makanan, 20% dari omset minuman, dan dibagi merata sejumlah pekerja yang bekerja pada saat itu. Pemilik inspirasi corner cafe juga memberikan berbagai macam fasilitas yang dapat dinikmati oleh para pekerjanya, fasilitas tersebut antara lain : kamar atau tempat tinggal gratis, beras gratis, bensin kendaraan diisi penuh selama kendaraan tersebut digunakan untuk membantu operasional kafe, air dan listrik gratis, wifi gratis, jaminan makan minum gratis, dan lain-lain. Adapun persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh mia mandasari adalah perbandingan pekerjaan yang dilakukan dalam penelitian ini dianggap belum sesuai atau tidak sepadan dengan jumlah bagi hasil yang diperoleh jika dibandingkan dengan tenaga yang dikeluarkan serta tanggung jawab yang dibebankan sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh mia mandasari adalah pembagian hasil yang disamaratakan baik untuk pekerja parkir maupun untuk pemilik lahan parkir.⁵⁰
2. Penelitian yang dilakukan Ferinda Tiaranisa (2018) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Cuci Mobil Dengan Pengelola”. Menjelaskan bahwa pelaksanaan usaha cuci mobil kusuma utama dilakukan dengan cara pemilik berkerjasama

⁵⁰ Mia Mandasari *Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Mudharabah*, (2019).

dengan memberikan modal dan kepercayaan kepada pengelola untuk mengelola cucian mobil yang mana modal tersebut sepenuhnya berasal dari pemilik yang diserahkan kepada pengelola dan hasilnya dibagi dua dari pemilik dan pengelola. Praktik kerjasama antara pemilik dan pengelola yaitu pendapatan dikurangi modal, sehingga dari sisa hasil keuntungan tersebut barulah dibagi dua, untuk pemilik 50% dan pengelola 50%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Ferinda Tiaranisa menyimpulkan bahwa untuk memastikan usaha tersebut lancar, maka dilakukan dengan cara baik dengan membagi keuntungan pada saat pekerjaan sudah selesai dilakukan, baik dalam perhitungan bulanan atau periode waktu tertentu lainnya. Penerapan bagi hasil tersebut merupakan kerjasama yang mana keuntungannya dibagi atas keuntungan yang diperoleh sesuai dengan konsep *mudharabah muqayyadah* yaitu akad yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang membuat kesepakatan untuk suatu kegiatan perdagangan yang disepakati secara bersama. Namun seringkali para penggelut usaha tidak melaksanakan sistem bagi hasil berdasarkan konsep *mudharabah muqayyadah* seperti yang beliau paparkan yang mana konsepnya keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan sedangkan kerugian selama bukan kelalaian dari si pengelola maka ditanggung oleh pemilik modal. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferinda Tiaranisa adalah, kesepakatan yang disepakati oleh pemilik dan pengelola sama-sama menggunakan akad lisan, serta bagi hasil diberikan pada saat pekerjaan sudah diselesaikan (setiap hari).

Sedangkan perbedaannya adalah bagi hasil yang diberikan dalam penelitian ini 50 % dari hasil hasil parkir perharinya di bagi merata/ disamaratakan pkerja parkir (10 pekerja parkir) serta pembagian hasil untuk pemilik lahan disamaratakan antar pemilik lahan satu dengan yang lain.⁵¹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Reni Anggraini (2017) yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak”. Menjelaskan bahwa sistem bagi hasil pertambakan ini dilakukan menurut kebiasaan masyarakat setempat, bentuk transaksinya dilakukan secara lisan. Tidak dihadiri saksi hanya dilakukan antara kedua belah pihak saja, yaitu pemilik tambak dan pengelola tambak. Adapun cara pembagian hasilnya adalah 2/3 untuk pemilik tambak karena pemilik tambak yang menyediakan pakan ikan juga bibit ikan untuk tambak tersebut. Dan pengelola tambak memperoleh bagi hasil sebesar 1/3 cara pembagian ini dilakukan karena pengelola hanya bertugas memberi makan (memelihara ikan) saja. Sedangkan apabila terjadi kerusakan tanggul dan kerusakan lainnya ditanggung oleh pemilik tambak. Pelaksanaan bagi hasil pertambakan yang diterapkan didasarkan pada adat kebiasaan masyarakat, perjanjian dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian harusnya disaksikan oleh beberapa orang saksi dan tertulis. Adapun persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Reni Anggraini adalah kesepakatan tersebut sama-sama dilakukan secara lisan

⁵¹ Ferinda Tiaranisa, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola*, (2018).

dan disepakati dengan adanya unsur kerelaan dari kedua belah pihak. Sedangkan perbedaannya adalah perbandingan jumlah bagi hasil dan pekerjaan yang dilakukan dalam penelitian ini dianggap belum sesuai atau tidak sepadan dengan jumlah bagi hasil yang diperoleh jika dibandingkan dengan tenaga yang dikeluarkan serta tanggung jawab yang dibebankan atau dalam hal ini pembagian hasilnya disamaratakan baik untuk pekerja parkir maupun untuk pemilik lahan.⁵²



⁵² Reni Anggraini, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak*, (2017).

DAFTAR PUSTAKA

Kitab

AL-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulighul Maram Min Adillatil Ahkam*, Jakarta : PT Elex Media Kumputindo, 2012.

Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil Cipta Media, 2002.

Buku

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Kep,'aktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Reneka Cipta, 2013.

Arsip Desa Pejambon Kecamatan Negeri Katon kabupaten Pesawaran.

A.Mas'adi, Ghufro, *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Cetakan 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Anggraini, Reni, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak*, 2017.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalat*, Jakarta: Bulan Bintang, 2008.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung : C.V. Pustaka Setia, 2002.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa. Indonesia*, Jakarta: Pustaka, 2002.

Departmen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005.

Hasanudin, *hukum perbankan syariah di indonesia*, Yogyakarta: Genta Press, 2008.

Hakim, Lukman, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2012.

Harun, *fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Hidayat, Enang, *transaksi ekonomi syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

Iska, Syukri, *Sistem Perbankan Syari'ah di Indonesia dalam Prespektif Fikih Ekonomi*, Jakarta: Fajar Media Press, 2010.

Mandasari, Mia, *Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Mudharabah*, 2019.

Mardalis, *Metode Pendekatan Suatu Proposal*, Jakarta : Bumi Aksara, cet-ke 13, 2014.

Mardalis, *Metode penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: UPP- Akademi Managemen
Perusahaan YKPN, 2004.

Mustofa, Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Mujahidin, Akhmad, *Hukum Perbankan Syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, Bogor : Penerbit
Ghalia Indonesia, 2017.

Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
Perubahan atas Peratur Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun
2011 Tentang Restibusi Jasa Umum.

Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2012, Tentang
Restibusi Jasa Usaha.

Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2012, Tentang
Restibusi Jasa Usaha.

Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2012, Tentang
Restibusi Jasa Usaha.

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir 1998.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2012, Tentang Restibusi
Jasa Usaha

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 tahun 2012 Tentang Restibusi
Jasa Usaha

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*,
Jakarta : Pusat Bahasa, 2008.

Raco, J.R., *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulanya*, Jakarta: Grasindo, 2008.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1998.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, cet-ke 27, 2018.

Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian Dan Penertiban LP2M Institute Agama Islam Negri Raden Intan Lampung, 2015.

Suwardjoko, Warpani, *rekayasa lalu lintas*, Jakarta: Bharata 1998.

Syafe'i, Rachmad, *fiqh muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Tiaranisa, Ferinda, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola*, 2018.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, Tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan Raya

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, Tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan Raya.

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, cetakan ke-4*, Jakarta: Balai Pustaka.

Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Jurnal

EfaRodiahNur, Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern,*Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 1, April 2015.

Wawancara

Ari, Wawancara Dengan pekerja parkir pada Kegiatan Open Turnamen di Desa Pejambon.

Bagio, Wawancara Dengan Pengurus Tim Sepak Bola Merpati Fc Desa Pejambon Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

Bonar, Wawancara Dengan pekerja parkir pada Kegiatan Open Turnamen di Desa Pejambon.

Fani, Wawancara Dengan Pekerja Parkir pada Kegiatan Open Turnamen di Desa Pejambon.

Gendur dan Ngatimin, Wawancara Dengan Pemilik Lahan pada Kegiatan Open Turnamen di Desa Pejambon.

Gisela, Wawancara Dengan Sekertaris Kegiatan Open Turnamen di Desa Pejambon Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

Karsan, Wawancara Dengan pemilik lahan pada Kegiatan Open Turnamen di Desa Pejambon.

Lutfi, Wawancara Dengan pekerja parkir pada Kegiatan Open Turnamen di Desa Pejambon.

Mahfud aziz, Wawancara Dengan wakil Ketua Pelaksana Kegiatan Open Turnamen di Desa Pejambon.

Niko, Wawancara Dengan pekerja parkir pada Kegiatan Open Turnamen di Desa Pejambon.

Parsimin, Wawancara Dengan Ketua Pelaksana Kegiatan Open Turnamen di Desa Pejambon.

Reki, Wawancara Dengan pekerja parkir pada Kegiatan Open Turnamen di Desa Pejambon.

Rian, Wawancara Dengan Pekerja Parkir Kegiatan Open Turnamen di Desa Pejambon Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

Riko, Wawancara Dengan pekerja parkir pada Kegiatan Open Turnamen di Desa Pejambon.

Sakijo, Wawancara Pribadi Dengan Pemilik Lahan pada Kegiatan Open Turnamen di Desa Pejambon.

Topik, Wawancara Dengan pekerja parkir pada Kegiatan Open Turnamen di Desa Pejambon.

Wawan dan Dedi, Wawancara Dengan pekerja parkir pada Kegiatan Open Turnamen di Desa Pejambon.